

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

Beberapa pengertian tentang akuntansi yang dapat diungkapkan oleh penulis dalam penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman tentang akuntansi sebelum lebih jauh membahas mengenai akuntansi pemerintahan diantaranya adalah menurut Kieso dalam Dwi Martani, dkk (2012:4) bahwa akuntansi diartikan sebagai berikut :

“Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data atau informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas”.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:2) adalah :

“Sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka sampai pada pemahaman penulis bahwa akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Oleh karena itu informasi dalam mempermudah pengelolaan organisasi mengenai laporan keuangan dibutuhkan suatu sistem akuntansi.

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan di beberapa sumber disebut dengan akuntansi sektor publik. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan pemerintah, BUMN/ BUMD, universitas, yayasan, dan organisasi nirlaba lainnya.

Akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim (2012:42), adalah sebagai berikut :

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah”.

Menurut Indra Bastian (2010:15) akuntansi sektor publik adalah :

“Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta”.

Mardiasmo (2011:140) menerangkan pengertian akuntansi sektor publik adalah :

“Akuntansi sektor publik sebagai entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik”.

Berdasarkan dari pengertian di atas kesimpulannya akuntansi sektor publik merupakan aktivitas suatu pelayanan untuk kepentingan publik dan pengelolaan dana untuk publik.

2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association dalam Mardiasmo (2011:144) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan badi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

2.1.1.3 Standar Akuntansi Sektor Publik

Standar akuntansi sektor publik atau Standar Akuntansi Pemerintahan sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan institusi milik pemerintah. Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2010:138) adalah :

“Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. ”

Standar Akuntansi Pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.1.4 Kandungan Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang memuat 11 Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi pemerintah. Untuk lebih jelasnya, kandungan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan
PSAP 01 membahas tentang tujuan laporan keuangan, basis akuntansi, periode pelaporan, komponen laporan keuangan. Dan untuk lebih jelasnya sebagai berikut:
 - 1) Tujuan Laporan Keuangan
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
 - 2) Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana
 - 3) Periode Pelaporan
Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun.
 - 4) Komponen Laporan Keuangan
Laporan Keuangan berdasarkan PP 24 tahun 2005, yang menyatakan bahwa “Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan”.
2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, serta menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas umum negara/kas daerah selama periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas keuangan pemerintah sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas negara/daerah dalam rangkapencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Bahkan penentuan adanya hak dan kewajiban pemerintah diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas umum negara/kas daerah. Hal ini sesuai dengan basis yang dianut yaitu basis kas menuju akrual. Laporan arus kas menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas.

4. PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bentuk Laporan yang paling tidak terstruktur, sehingga cara pembacaannya pun sangat akrab dengan cara pembacaan yang dikuasai oleh kaum awam. Oleh karena itu, jika Catatan atas laporan Keuangan ini dapat memuat aspek-aspek yang memadai dan lengkap, bisa jadi ia akan menjadi suatu sumber informasi yang sangat relevan bagi pengambilan keputusan bagi pengguna umum. Pada intinya, isi Catatan ini adalah menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah memengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas yang apabila tidak dijelaskan akan dapat menyesatkan pembaca laporan keuangan pemerintah.

5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya memberikan pemahaman yang mendalam terhadap persediaan, maka perlu diberikan batasan yang dapat dipedomani untuk dapatmengklasifikasikan suatu aset kedalam kelompok persediaan.

6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi

Investasi adalah kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untukmemperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap
Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Pengertian aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
8. PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman.
10. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan, Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
 - 1) Koreksi Kesalahan
Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Periode berjalan adalah periode sebelum laporan keuangan belum ditetapkan dengan Perda.
 - 2) Perubahan Kebijakan Akuntansi
Adakalanya kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam suatu periode akuntansi berbeda dengan periode sebelumnya. Paragraf 26 PSAP 10 menyatakan bahwa: Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

3) Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa atau normal suatu entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisiaset/kewajiban.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umumpelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Mardiasmo (2011:160) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitasnya.

Menurut Suwardjono (2010:110) pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah :

“Struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial Negara”.

Adapun definisi laporan keuangan daerah menurut Zaki Baridwan (2012: 17) yaitu:

“Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah:

“Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.”

Laporan keuangan berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP, “Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan”.

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- a) Kas dan setara kas
- b) Investasi jangka pendek
- c) Piutang pajak dan bukan pajak
- d) Persediaan
- e) Investasi jangka panjang
- f) Aset tetap
- g) Kewajiban jangka pendek
- h) Kewajiban jangka panjang
- i) Ekuitas dana

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Di dalam laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola

oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporanrealisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagaiberikut:

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/defisit
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

3. Laporan arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

4. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

2.1.3 Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Informasi

Informasi tidak lepas kaitannya dengan data, informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Penuturan sebelumnya

sesuai dengan pengertian informasi dan data yang dikemukakan oleh Hall (2011:11) yakni:

“Data are facts, which may or maynot be processed (edited, summarized, or refined) and have no direct effect on the user. By contrast, information causes the user to take an action that he or she otherwise could not, or would not, have taken. Information is often defined simply as processed data. This is an inadequate definition. Information is determined by the effect it has on the user, not by its physical form.”

Menurut Laudon & Laudon (2014:45) yakni:

“By information we mean data that have been shaped into a form that is meaningful and useful to human beings. Data, in contrast, are streams of raw facts representing events occurring in organizations or the physical environment before they have been organized and arranged into a form that people can understand and use.”

Menurut Gelinis *et al* (2012:18) yakni:

“Information is data presented in a form that is useful in a decision-making activity. The information has value to the decision maker because it reduces uncertainty and increases knowledge about a particular area of concern. Data are facts or figures in raw form. Data represent the measurements or observations of objects and events. To become useful to a decision maker, data must be transformed into information.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa data merupakan fakta yang belum diolah. Sedangkan informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah dan diorganisasikan, sehingga memberikan arti bagi penerima yang dapat mempengaruhi tindakan dalam pengambilan keputusan.

2.1.3.2 Pengertian Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Suwardjono (2010:111) nilai informasi laporan keuangan daerah adalah :

“Kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan”.

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 nilai informasi laporan keuangan daerah adalah :

“Kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid”.

Nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah menurut Fadila Ariesta (2013) adalah

“Keterandalan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid sedangkan ketepatanwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi itu kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan”.

Suwardjono (2010:165) menyatakan agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

2.1.3.3 Karakteristik Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun karakteristik kualitatif nilai informasi laporan keuangan pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dalam

Suwardjono (2010:112), yaitu:

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
 - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam peng-ambilan keputusan.
 - d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
 - a) Penyajian jujur. Informasi meng-gambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat di-harapkan untuk disajikan.
 - b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Infor-masi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.4 Kualitas Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen utama suatu organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya seperti Modal, teknologi dan uang sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan baik swasta maupun pemerintahan seperti perubahan-perubahan lingkungan bisnis, lingkungan kerja, menghendaki perusahaan/organisasi harus melakukan pengembangan sumberdaya manusia secara pro aktif sehingga tidak terjadi keusangan kemampuan pegawai dan juga untuk meningkatkan produktifitas.

Menurut Widodo (2011:68) :

Kualitas sumberdaya manusia adalah kemampuan sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Menurut Amstrong (2009:30-31) :

“Performance should be deined as the outcomes of work because they provide the strongest linkage to the strategic goals of the organization, customer satisfaction and economic contribution”.

Menurut Celvina (2010:21), kinerja sumber daya manusia adalah:

“Kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil”.

Berdasarkan beberapa pengertian kualitas sumber daya manusia dapat disimpulkan bahwa kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah dibekali dengan pendidikan serta pengalaman yang cukup khususnya dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Tjiptoherijanto (2012:57), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu :

- “ 1. *Level of responsibility* dan
2. Kompetensi sumber daya tersebut”.

Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan dan tanggungjawab pada pekerjaan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengertian teknologi informasi menurut Abdul Kadir dan Terra Ch Triwahyuni (2012:2) adalah:

“Teknologi informasi adalah seperangkat yang membantu melakukan pekerjaan dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi”.

M.Suyanto(2010:10) mendefinisikan teknologi informasi sebagai berikut:

“Teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi”.

Adapun menurut Laudon & Laudon (2014:45) teknologi informasi adalah:

“...consists of all the hardware and software that a firm needs to use in order to achieve its business objectives” yang artinya teknologi informasi terdiri dari seluruh *hardware* dan *software* yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah kombinasi dari *hardware*, *software*, dan teknologi telekomunikasi lainnya yang digunakan untuk pemrosesan informasi untuk mencapai tujuan bisnis organisasi.

Menurut Jogiyanto (2012:18) teknologi informasi memberikan lima peran utama di dalam organisasi :

- a. Meningkatkan efisiensi, yaitu menggantikan manusia dengan teknologi di proses produksi.
- b. Meningkatkan efektivitas, yaitu menyediakan informasi bagi para manajer di organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif yang didasarkan dengan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan sehingga mendapat hasil produksi yang akurat dan bebas dari cacat produksi sesuai dengan sasaran produksi yang

diinginkan.

- c. Meningkatkan komunikasi, yaitu mengintegrasikan penggunaan sistem teknologi informasi dengan menggunakan email dan chat.
- d. Meningkatkan kolaborasi, yaitu dengan menggunakan *video conference* dan *teleconference*.
- e. Meningkatkan kompetitif, yaitu sistem teknologi informasi digunakan untuk keunggulan kompetisi.

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan apabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi dalam arti lain pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan.

Jogiyanto (2012:3), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah :

“Pemanfaatan dalam komponen-komponen teknologi informasi berbasis komputer, yang terdiri dari : perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, data dan komunikasi data.”

Menurut Jurnal dan Supomo (2010) :

“Pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi”.

Menurut Wilkinson *et al*, (2011) :

“Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software, database*), jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi”

Menurut Jogiyanto (2012:7) bahwa aplikasi teknologi sangat berperan dalam pengelolaan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen. Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah yang andal. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya :

- (a) Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
- (b) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Menurut Jurnal dan Supomo (2010), konstruk pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan dimensi sebagai berikut :

- a) Perangkat; untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi, meliputi perangkat lunak, keras dan sistem jaringan.
- b) Pengelolaan Data Keuangan; untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh.
- c) Perawatan; untuk menggambarkan adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penggalian dari wacana penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya memperjelas tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, sekaligus untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti (Nama & Tahun) | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------------------------------|--|---|--|--|
| 1 | Aditya Rachman Prasetyo (2013) | Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Interen Akuntansi dan Good Corporate Governance Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada 32 Satuan Kerja di Polda Jambi) | Pertama, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan Good Corporate Governance mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah sedangkan kapasitas SDM tidak berpengaruh. Kedua, baik kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan Good Corporate Governance mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan satker Polda Jambi. | Menggunakan variabel kualitas SDM, pemanfaatan TI sebagai variabel independen dan nilai informasi pelaporanKeuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. | Tidak memasukan variabel sistem Pengendalian intern dan GCG sebagai variabel independen. |
| 2 | Fadila Ariesta (2013) | Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat) | Kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan. Pada pengujian kedua didapatkan hasil bahwa kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan. | Menggunakan variabel kualitas SDM, pemanfaatan TI sebagai variabel independen dan nilai informasi pelaporanKeuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. | Tidak memasukan variabel sistem Pengendalian intern sebagai variabel independen. |

| No | Peneliti (Nama & Tahun) | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------------------------------|---|---|---|--|
| 3 | Arina Roshanti, dkk(2014) | Pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan TI, dan sistem Pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporanKeuangan pemerintah daerah | Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuanganpemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikanterhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah,sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan secara simultan kualitas sumber daya manusia,pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internberpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuanpelaporan keuangan pemerintah daerah. | Menggunakan variabel kualitas SDM, pemanfaatan TI sebagai variabel independen dan nilai informasi pelaporanKeuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen | Tidak memasukan variabel sistem Pengendalian intern sebagai variabel independen |
| 4 | Wayan Edi Suparman, dkk (2014) | Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng | Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pemanfaatan Teknologi informasi (TI) berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng | Menggunakan variabel kualitas SDM, pemanfaatan TI sebagai variabel independen | Variabel dependen Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan rencana penelitian ini adalah nilai informasi pelaporanKeuangan pemerintah |

| No | Peneliti (Nama & Tahun) | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|---|---|---|
| 5 | Dyah Puru Surastiani dan Bestari D. Handayani (2015) | Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kualitas sumber daya manusia, Pemanfaatan TI dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah | Menggunakan variabel kualitas SDM, pemanfaatan TI sebagai variabel independen dan nilai informasi pelaporanKeuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen | Tidak memasukan variabel sistem Pengendalian intern sebagai variabel independen |

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan pada Tabel 2.1 di atas. Persamaannya adalah pihak yang berkepentingan mengharapkan nilai informasi laporan keuangan yang berkualitas. Persamaan pada penelitian terdahulu sama-sama meneliti nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebagai unit analisis serta kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dalam hubungannya dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Aditya Rachman Prasetyo (2013) pertama, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keterandaan pelaporan keuangan pemerintah sedangkan kapasitas SDM tidak berpengaruh. Kedua, baik kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan Good Corporate Governance mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan satker Polda Jambi.

Penelitian Fadila Ariesta (2013) kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan. Pada pengujian kedua didapatkan hasil bahwa

kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan.

Arina Roshanti, dkk (2014) kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan secara simultan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Wayan Edi Suparman, dkk (2014) kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pemanfaatan Teknologi informasi (TI) berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dyah Puru Surastiani dan Bestari D. Handayani (2015) kualitas sumber daya manusia, Pemanfaatan TI dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

Kualitas sumber daya manusia menunjukkan kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang yang sudah dibekali dengan

pendidikan serta pengalaman yang cukup khususnya dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang disyaratkan, maka pelaksanaan fungsi akuntansi akan berjalan secara optimal dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi mempunyai kualitas yang baik. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang memiliki nilai diantaranya adalah keandalan.

Teguh Wahyono (2014:12) menyatakan :

“dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai, menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan serta sumberdaya yang menghasilkannya. Kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang andal”.

Menurut Mardiasmo (2011:146) :

“Semakin berkualitas SDM, maka semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka semakin baik untuk pengambilan keputusan”.

Menurut Warisno (2010).

“Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu memahami logika akuntansi dengan baik, maka kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi tidak akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan laporan tersebut akan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai”.

Penelitian yang telah dilakukan Arina Roshanti, dkk (2014) ; penelitian Wayan Edi Suparman, dkk (2014) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

Teknologi informasi berperan membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Widjajanto (2010:89) menyatakan:

“Pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sehingga keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan juga dapat meningkat”.

Menurut Jogiyanto (2012:41)

“informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatanwaktuan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi.

Jogiyanto (2012:18) juga menyatakan bahwa :

“informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif”.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik”.

Penelitian yang telah dilakukan Arina Roshanti, dkk (2014) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.3 Pengaruh Kualitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

Pelaporan keuangan pemerintah daerah berjalan optimal apabila pemerintah daerah tersebut memperhatikan aspek Kualitas Sumber Daya Manusia dan aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi. Seperti yang ditemukan peneliti bahwa kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi sangat memberikan kontribusi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Melihat temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, maka perlunya menempatkan sumber daya manusia yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan dan diperlukan pemanfaatan teknologi yang tepat guna.

Kualitas sumber daya manusia sebagai kinerja yang mampu melaksanakan fungsi akuntansi, memiliki latar belakang pendidikan yang linier dan memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan kegiatan akuntansi yang mampu menghasilkan pelaporan keuangan optimal. Pelaporan keuangan yang optimal dibantu dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mumpuni sehingga laporan tersebut mudah diproses, disusun, disimpan, data dimanipulasi untuk menghasilkan data yang berkualitas yakni yang relevan, akurat dan tepat waktu, mudah diinformasikan di akses oleh seluruh masyarakat.

Penelitian yang telah dilakukan Fadila Ariesta (2013) menunjukkan bahwa

kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan.

Penelitian yang telah dilakukan Arina Roshanti (2014) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang telah dilakukan Dyah Puru Surastiani dan Bestari D. Handayani (2015) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

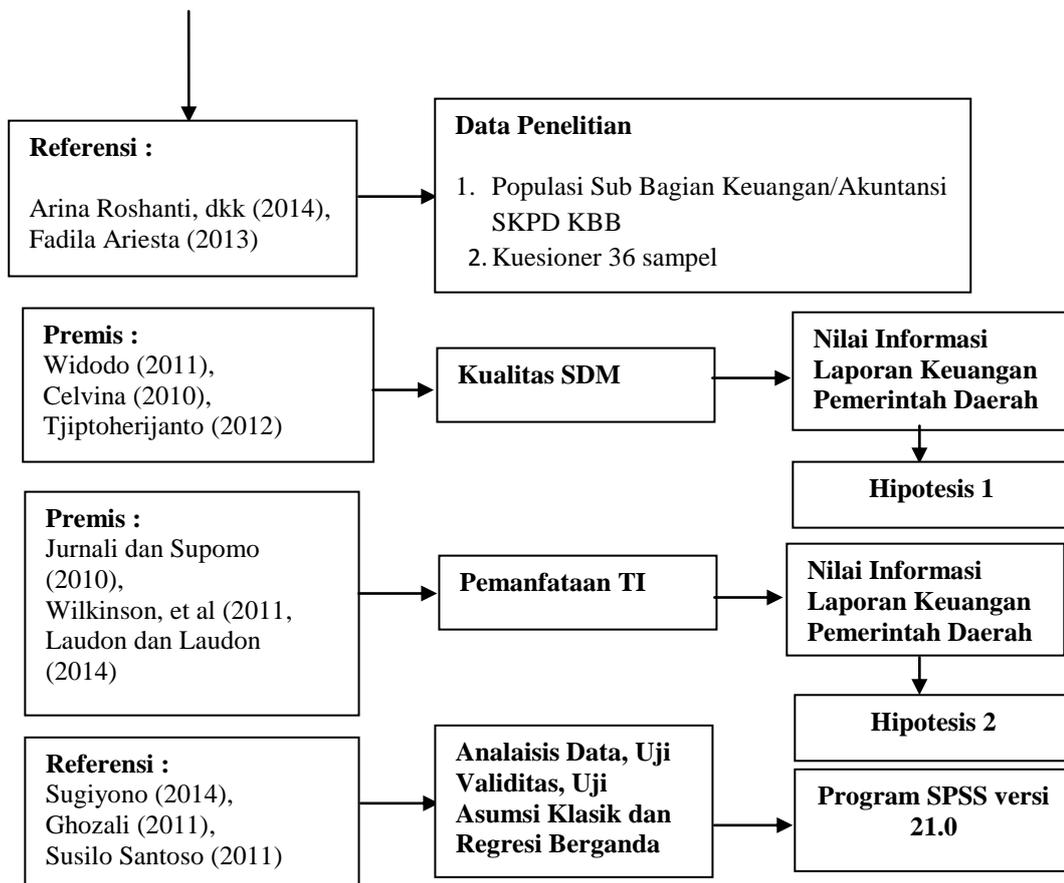
Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran secara keseluruhan yaitu sebagai berikut :

Landasan Teori :**Kualitas SDM:**

- Widodo (2011:68),
- Amrstrong (2009:31),
- Tjiptoherijanto (2012:57)

Pemanfaatan TI :

- Jogiyanto (2012:3)
- Jurnal dan Sunemo (2010)



Gambar 2.1Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka penulis mengajukan hipotesis, yaitu :

1. Kualitas SDM berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan
3. Kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan